

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Perumusan Masalah

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu kewajiban negara adalah melindungi hak-hak warganya agar dapat terpenuhi, termasuk di dalamnya adalah menjamin kesejahteraan warga negaranya maupun menjamin agar warga negaranya dalam mencapai kesejahteraan itu. Hal tersebut tertuang secara tersurat dalam konstitusi dasar setiap negara di dunia. Konstitusi Indonesia contohnya, yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan hal tersebut secara jelas: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia,”*¹ Dalam konstitusi negara lain seperti Amerika Serikat contohnya, setali tiga uang: *“We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.”*² Dengan asumsi demikian maka konsep “negara” atau “state” dalam konteks ini dapat disimpulkan sebagai kesatuan entitas politik dan teritorial yang berdaulat (*sovereign*) dalam mengatur kegiatan perekonomian domestik dan kesejahteraan warganya.

Definisi dan konsep di atas seharusnya relevan dalam hubungan antara negara dan kesejahteraan rakyat/negaranya. Meski demikian, pada kenyataannya negara-negara di dunia memiliki konsep yang berbeda-beda (unik) dalam menjalankan sistem

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat.

² Pembukaan Konstitusi Amerika Serikat alinea I. Konstitusi AS dapat diakses secara lengkap di <http://www.usconstitution.net/const.html>, diakses pada tanggal 6 Januari 2010.

perekonomiannya. Pascakeruntuhan Uni Soviet (blok komunis) pada awal 1990-an, sistem kapitalisme-liberalisme sedikit banyak memengaruhi perekonomian global. Dasar argumennya jelas, sistem kapitalisme yang berorientasikan pada peran pasar (*market*) itu, keluar sebagai pemenang tunggal *vis a vis* sosialisme-komunisme (dalam perekonomian disebut sebagai sistem etatisme), sementara belum ada alternatif lain yang sanggup mengalahkannya.³ Amerika Serikat contohnya yang merupakan jantungnya kapitalisme dengan sistem yang sudah sangat maju dibandingkan negara-negara lainnya. Fukuyama bahkan mengklaim kemenangan kapitalisme-liberalisme tersebut dalam karyanya yang terkenal, *The End of History and The Last Man*, yang diterbitkan pada dekade 1990-an.

Dengan dasar perkembangan ekonomi-politik internasional seperti tadi, idealnya kondisi ekonomi global khususnya, dapat berjalan linear (stabil) untuk periode waktu yang cukup lama. Kenyataannya tidak demikian, kegagalan pasar finansial yang berasal dari AS dan mencuat di tingkat global pada tahun 2008, mengundang kritik dan tentu saja pertanyaan atas relevansi sistem kapitalisme dan liberalisasi sektor finansial, terutama yang berdasar atas doktrin AS tadi.⁴ Negara-negara di dunia harus merespons krisis ini dengan intervensi konkret, menyimpang dari doktrin *laissez-faire* konvensional yang mendorong meminimalisasikan hingga eliminasi peran negara terhadap sektor perekonomian itu.⁵ Fenomena lain, pada tingkat kerja sama internasional kita dapat melihat sendiri bahwa biasanya penanganan krisis global diatasi dan didominasi oleh kelompok-kelompok elite global, seperti International Monetary Fund dan World Bank bersama negara-negara maju, kelompok G-7 contohnya (*old hegemon*).⁶ Akan tetapi, hal yang unik dari krisis finansial kali ini justru bahwa awal mula krisis berasal dari

³ Paul Krugman contohnya, menyinggung tentang “*Capitalism Triumphant*” ini sebagai bukan hanya bersifat ideologis, tapi sebagai “*idea*” yang dapat memengaruhi cara berpikir manusia, *lih.* Paul Krugman, *The Return of Depression Economics and The Crisis of 2008*, New York: W.W. Norton Company, 2009, h. 10-14.

⁴ *Laissez-faire* yang dimaksud adalah orientasi kebijakan negara terhadap pasar ala AS yang dikenal sebagai *platform Washington Consensus*. Untuk penjelasan lebih mendalam *lih.* contohnya Ben Fine (ed.), *Development Policy in the Twenty First Century: Beyond the Post Washington Consensus*, London: Routledge, 2001. Doktrin dasar dari *the Washington Consensus* mencakup tiga hal, antara lain: liberalisasi perdagangan (*free-trade*), deregulasi, dan privatisasi.

⁵ Intervensi negara dalam mengatasi krisis saat itu, terutama negara seperti AS adalah stimulus fiskal, *monetary policy expansion*, dan *bail-out* (dana talangan).

⁶ Dasar asumsinya adalah bahwa institusi keuangan internasional dan pasar global (MNC) didominasi oleh rezim kapitalis barat, lihat Jacques B. Gelinas, *Juggernaut Politics*, London: Zed Books, 2003, terutama bab III – “The Masters of the Globalized World”.

jantungnya kapitalisme global dengan *laissez-faire*nya itu, Amerika Serikat, dan tidak lagi melulu didominasi penanganannya oleh *old hegemon* yang disebutkan tadi.

The Group of Twenty Countries atau yang biasa disebut G-20⁷ yang menguasai sekitar 80% perdagangan global dan 2/3 populasi dunia, duduk bersama dalam tiga konferensi tingkat tinggi (*summit*) terpisah untuk mencari solusi bersama terkait krisis finansial global, yakni pada 15 November 2008 di Washington, AS pada 2 April 2009 di London, Inggris, dan terakhir di Pittsburgh, AS pada 25 September 2009. Hasil ketiga *summit* tersebut antara lain adalah tiga komunique bersama yang memuat sebanyak total 290 komitmen bersama dalam mengatasi krisis dan mencapai *sustainability growth* melalui reformasi sistem dan institusi finansial internasional, serta regulasi bersama. Negara-negara anggota G-20 menyepakati intervensi negara ke pasar melalui pemberian paket stimulus sebanyak US\$ 1,1 trilyun,⁸ penerapan kebijakan fiskal, penataan sektor finansial, dan pembatasan hingga penghapusan praktik '*tax havens*'.⁹

Hasil komunique G-20 dalam sistem keuangan internasional mengindikasikan adanya peran/intervensi negara (secara kolektif) yang dominan dalam mekanisme pasar domestik maupun global, yang bertentangan dengan asumsi dasar neoliberalisme dalam perekonomian *laissez-faire*.¹⁰ Intervensi negara terhadap pasar yang sejauh ini sudah konkret salah satunya adalah kebijakan fiskal beserta stimulus fiskal, dan dana talangan (*bail-out package*). Terkhusus mengenai stimulus fiskal, para negara anggota G-20 sepakat menggulirkannya demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi

⁷ Terdiri atas (berdasarkan alfabet bahasa Inggris): Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris Raya, Amerika Serikat, Uni Eropa.

⁸ <http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/03/g20-gordon-brown-global-economy>, diakses pada tanggal 10 April 2009.

⁹ '*Tax havens*' adalah sebutan bagi negara-negara atau wilayah otoritas yang menyediakan fasilitas kemudahan ringan pajak bahkan bebas pajak (0%) serta kemudahan-kemudahan lain yang bertentangan dengan *International Agreed Tax Standard*. Daftar *tax havens* terbaru (2009) yang dirilis OECD dan G-20 dapat diakses di <http://www.oecd.org/dataoecd/38/14/42497950.pdf>. Hasil komunique G-20 pada KTT London 2009 dapat diakses di <http://www.londonsummit.gov.uk/resources/en/news/15766232/communique-020409>, diakses pada tanggal 10 April 2009.

¹⁰ Asumsi dasar perekonomian *laissez-faire* adalah "*market as a self-regulating and self-correcting 'smoothly functioning machine' governed by objective laws and universal principles ... under certain circumstances and assumptions such as complete information and non-oligopolistic competition, leads to an optimal allocation of given resources*", lihat Robert Gilpin, *Global Political Economy*, New Jersey: Princeton University Press, 2001, h. 54.

pelemahan perekonomian.¹¹ Berikut dipaparkan sebuah ringkasan mengenai langkah penanganan krisis oleh G-20:

Tabel 1
Peran konkret negara dalam penanganan krisis finansial global 2008-2009

Tipe solusi	Implementasi solusi	Implementasi konkret
Jangka pendek	1. Dana talangan (<i>bail-out package</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • AS: 700 miliar dollar AS¹² • Perancis: 360 miliar Euro¹³ • Jerman: 500 miliar Euro¹⁴ • Inggris: 692 miliar dollar AS¹⁵
	2. Paket stimulus (<i>stimulus package</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • AS: 787 miliar dollar AS¹⁶ • Inggris: 200 miliar Euro¹⁷ • Perancis: 26 miliar Euro¹⁸ • Jerman: 50 miliar Euro¹⁹ • China: 4 triliun yuan (586 miliar dollar AS)²⁰ • Indonesia: Rp 2 triliun²¹
Jangka menengah	<i>Bilateral Currency Swap Arrangement</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia-China senilai 100 miliar yuan untuk 3 tahun²² • China-Argentina senilai 70

¹¹ Rumus standar stimulus fiskal yang dimaksud adalah sebesar 2% dari total GDP negara yang bersangkutan pada 2008, dan sebesar 1.5% GDP pada 2009.

¹² <http://english.aljazeera.net/news/americas/2008/09/200892921221178162.html>, diakses pada tanggal 17 April 2009.

¹³ <http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/3190311/Banking-bail-out-France-unveils-360bn-package.html>, diakses pada tanggal 17 April 2009.

¹⁴ <http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,584781,00.html>, diakses pada tanggal 17 April 2009.

¹⁵ <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7658277.stm>, diakses pada tanggal 7 April 2009.

¹⁶ http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/subjects/u/united_states_economy/economic_stimulus/, diakses pada tanggal 17 April 2009.

¹⁷ <http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/3725106/EU-agrees-200bn-stimulus-package.html>

¹⁸ <http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7864942.stm>, diakses pada tanggal 17 April 2009.

¹⁹ <http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/27/germany-europe>, diakses pada tanggal 17 April 2009.

²⁰ Kompas, 4 April 2009, "Pesanan Produk Manufaktur di China dan AS naik".

²¹ <http://www.thejakartapost.com/news/2009/02/25/stimulus-package-approved-raised.html>, diakses pada tanggal 17 April 2009.

²² http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Berita/news_230309.htm, diakses pada tanggal 17 April 2009.

		miliar yuan untuk 3 tahun ²³ <ul style="list-style-type: none"> • China-Malaysia, China-Korea Selatan, China-Belarusia²⁴
Jangka panjang	1. Penguatan aksi multilateral	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi kapital kolektif sebanyak 1,1 triliun USD untuk memulihkan kredit, pertumbuhan, dan ekonomi²⁵

Sumber: dirangkum penulis dari beberapa media cetak dan *online*

Sementara itu, pemetaan perundingan G-20 April 2009 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Langkah Penanganan Krisis Finansial
KTT G-20 2 April 2009²⁶

Prioritas kunci	Negara-negara yang mengusulkan dan/atau mendukung program
Pencegahan proteksionisme	Brasil, Inggris, Kanada, China, India, Meksiko, Korea Selatan, Turki
Reformasi peraturan sektor keuangan	Argentina, Brasil, Inggris, Kanada, China, UE, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, Korea Selatan, AS
Pemberantasan praktik “ <i>tax heaven</i> ”	Argentina, Inggris, Perancis, Jerman, AS
Reformasi IMF	Inggris, Kanada, China, UE, Jerman, Indonesia, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Turki
Peran lebih besar kepada negara berkembang	Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, Turki

²³ <http://online.wsj.com/article/BT-CO-20090330-700165.html>, diakses pada tanggal 17 April 2009.

²⁴ <http://seekingalpha.com/article/129094-china-s-first-step-towards-bilateral-currency-swaps>, diakses pada tanggal 17 April 2009.

²⁵ Komunike G-20 2 April 2009, poin no. 5.

²⁶ *Kompas*, 4 April 2009, “G-20 Buka Era Baru”.

Stimulus baru	Inggris, Jepang, Turki, AS
---------------	----------------------------

Sumber: Harian *Kompas*, 4 April 2009.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, yaitu bahwa salah satu hal menarik dari hasil pertemuan G-20 tersebut adalah negara-negara anggota G-20 menyepakati untuk menggulirkan kebijakan fiskal demi mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Sangat kontras jika kita bandingkan bahwa selama ini kebanyakan negara dunia (terutama negara-negara maju) mengandalkan kebijakan moneter.²⁷ Sampai pada titik ini, asumsi awal penulis yakni bahwa di balik berbagai motif/kepentingan negara-negara terkait (*state's interests*)²⁸, negara-negara yang tergabung dalam G-20 dapat duduk bersama dan menghasilkan komunique KTT G-20 atas dasar minimal satu *raison d'être* - kepentingan nasional dalam bidang perekonomian. Setiap negara yang terlibat dalam G-20 ingin melindungi kepentingannya masing-masing, sementara di sisi lain negara-negara juga berusaha menjaga mekanisme global agar tetap harmonis berhubung krisis di negara lain juga sedikit banyak dapat memengaruhi perekonomian domestiknya masing-masing.²⁹

²⁷ Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dan bank sentral yang mengatur *the supply of money, availability of money, cost of money or rate of interest* dengan tujuan stabilitas harga dan stabilitas tingkat inflasi. Kebalikannya adalah kebijakan fiskal, yakni bentuk kebijakan ekonomi makro dari pemerintah di mana pencapaian sasarannya difokuskan pada barang-barang di dalam negeri (*domestic goods*), rumah tangga, ataupun perusahaan/swasta/pengusaha. Bentuknya seperti peningkatan belanja negara, pinjaman negara, dan pemotongan pajak.

²⁸ Setidaknya ada tiga kubu besar yang terbagi-bagi kepentingannya, yaitu kubu AS yang bersikukuh dengan *laissez-faire* konvensional (*Washington Consensus*), kubu UE yang menginginkan regulasi ketat dalam sektor finansial global, hingga kubu China-Rusia yang menginginkan perubahan radikal seperti penggantian *global currency* dan porsi yang lebih negara-negara berkembang dalam institusi keuangan internasional seperti IMF dan World Bank, lih. beritanya di <http://english.aljazeera.net/focus/the2009g20londonsummit/2009/03/200933175919839773.html>, diakses pada tanggal 1 April 2009.

²⁹ Berangkat dari asumsi interdependensi ekonomi; dalam konteks ini, negara-negara yang bukan penyebab krisis juga terkena imbasnya. China contohnya, sebagai salah satu basis pengekspor global harus 'menyesuaikan' diri akibat krisis ini. Negara-negara maju yang menjadi tujuan eksportnya tidak memiliki cukup uang untuk tetap membeli produk-produk China sebanyak yang dilakukannya pada masa lalu.

1.2. Permasalahan Penelitian

Perdagangan bebas, termasuk dalam sektor finansial memberikan peluang (secara ekonomis) yang lebih besar kepada pasar dan aktor-aktor di dalamnya untuk meningkatkan kemakmuran setiap individu dan negara yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi, efek negatif yang ditimbulkannya (dalam konteks ini isu finansial transnasional) juga tidak kecil dan berimplikasi luas, bahkan hingga memengaruhi kehidupan bernegara (politik) sekalipun. Krisis finansial dapat menyedot cadangan devisa negara, meningkatkan inflasi, berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah pengangguran, hingga *social unrest*. Di AS contohnya, para pembayar pajak (*tax-payers*) menuntut hak mereka yang merasa dirampas karena *bail-out policy* terhadap perusahaan-perusahaan finansial raksasa seperti Lehman Brothers, Merrill Lynch, dan lain-lain, sementara para eksekutifnya tetap hidup bermewah-mewahan dengan uang dari para pembayar pajak tersebut. Di Perancis, bonus ‘wah’ (*golden parachutes*) para eksekutif MNC semakin dibatasi mengingat isu yang sangat sensitif tersebut. Di belahan Eropa lainnya, Islandia, Estonia, dan Latvia tiga rezim pemerintahan jatuh pada Maret 2009 akibat inflasi yang meroket dan gencarnya tuntutan publik. Sementara di Hungaria, Perdana Menteriya mengajukan permohonan pengunduran diri dari pemerintahan.³⁰

Krisis finansial global 2008³¹ yang berasal dari Amerika Serikat telah menyebabkan dampak yang sangat luas secara ekonomi dan politik bagi seluruh dunia, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Untuk mengatasinya pun diperlukan penanganan kolektif dari negara-negara yang bersangkutan.³² Terdapat beberapa permasalahan dalam konsep multilateral / kolektif tersebut, terutama jika dikritisi dari beberapa paradigma HI yang ada. Pertama, kegagalan pasar (finansial) dalam mengoreksi dirinya sendiri memberikan keraguan tersendiri terhadap praktik liberalisasi ekonomi (finansial) yang selama ini berlangsung. Kedua, jika kita berpegang pada tradisi realisme

³⁰ *Kompas*, 22 Maret 2009, “PM Hongaria Minta Mundur, Tiga Pemerintahan Jatuh”.

³¹ Krisis di AS sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2006 di mana harga properti AS yang tadinya meroket kemudian anjlok (*housing bubble*) hingga sebesar 20% pada pertengahan 2007. Tahun 2008 pada tulisan ini mengacu pada tahun pertemuan pertama KTT G-20 pada periode krisis sekaligus titik terendah dalam saham global.

³² “*A global solution for a global problem*”. Salah satunya seperti yang dikemukakan oleh ekonom Joseph Stiglitz, lihat <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/apr/09/global-economy-development>, diakses pada tanggal 15 April 2009.

HI, paradigma tersebut menghadapi tantangan bahwa *states* (negara-negara G-20) ‘bekerja sama’ dalam tingkat internasional.³³ Dan ketiga, *states* dalam konteks kerja sama internasional penanganan krisis tidaklah sendirian, terlepas dari seberapa besar/signifikansi aktor-aktor dalam memengaruhi hasil-hasil yang ingin dicapainya.

Oleh karena itu, mengamati peran negara-negara G-20 yang dominan dalam pasar domestiknya dan kemudian beranjak ke pasar global, tulisan ini pada intinya akan meneliti tentang kontribusi G-20 terhadap penanganan krisis finansial dan dominasi peran negara terhadap sektor perekonomian.

Berangkat dari tujuan tersebut, pertanyaan penelitian yang membangun penelitian ini adalah:

“Bagaimana tiga komuni G-20 dan intervensi konkret negara-negara anggotanya terhadap sektor perekonomian/finansial telah merespons ancaman-ancaman krisis finansial tersebut?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk mendeskripsikan ancaman krisis finansial global pada periode 2008-2009. Sementara tujuan khususnya yaitu untuk mengidentifikasi kontribusi peran negara-negara anggota G-20 dan rezim internasional terhadap penanganan krisis finansial global 2008-2009. Hal tersebut akan bermanfaat bagi studi Hubungan Internasional, khususnya kajian ekonomi politik internasional dalam upaya kerja sama internasional *ad hoc* dan peran negara terhadap sektor perekonomian domestik maupun global.

Demi mencapai tujuan penelitian tersebut maka penulis menerapkan beberapa pembatasan dalam penulisan Tesis ini. Pembatasan yang pertama yaitu pembatasan periode waktu. Fokus analisis Tesis adalah pembahasan krisis finansial global periode 2008 hingga 2009. Penulis memilih titik awal tahun 2008 dikarenakan tahun 2008

³³ Menurut realisme HI contohnya berdasarkan asumsi Hans Morgenthau bahwa “*states are self-interested, power seeking rational actors who seek to maximize their security and chances of survival, and any cooperation between states is explained as functional in order to maximize each individual state's security*”, lih. Hans Morgenthau & Kenneth Thompson, *Politics Among Nations*, 6th edition, New York: McGraw-Hill, 1985.

merupakan tahun kritis di mana krisis finansial global diidentifikasi masyarakat internasional sebagai krisis “global”, bukan krisis Amerika semata. Sekain itu, tahun 2008 merupakan tahun pertama pertemuan tingkat tinggi (*summit*) negara-negara anggota G-20 yang melahirkan dokumen resmi pertama berupa komunike G-20 sebagai respons terhadap ancaman krisis finansial.

Pembatasan kedua yakni pembatasan faktor-faktor penelitian. Penulis hanya akan membahas faktor urgensi dan signifikansi peran negara terhadap perekonomian pada masa krisis. Secara umum, pembahasan berkisar pada faktor urgensi keadaan domestik dan global yang kemudian membutuhkan intervensi negara. Lebih khusus, aspek signifikansi peran negara yang akan dibahas berkisar pada *political will* masing-masing negara anggota G-20 dalam menangani krisis beserta langkah konkret yang telah dicapai bersama.

Pembatasan terakhir yakni pada pemilihan kata “rezim”. Konsep “rezim” yang digunakan dalam Tesis ini adalah yang mengacu pada definisi Stephen Krasner.³⁴ Menurut Krasner, “rezim” dapat diaplikasikan sebagai *intervening variable* dalam menjelaskan hubungan antara peran negara dan institusi internasional yang ada. Definisi “rezim” menurutnya yaitu “*international regimes are defined as principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actor expectations converge in a given issue-area.*” - Prinsip (*principles*) didefinisikan sebagai kepercayaan atas fakta, variabel penyebab (*causation*), dan pembenaran (*rectitude*). Norma (*norms*) adalah standar perilaku yang mendefinisikan hak dan kewajiban anggotanya. Peraturan (*rules*) adalah resep (*prescription*) atau larangan (*proscription*) atas aksi. Prosedur perumusan kebijakan (*decision-making procedures*) adalah praktik umum dalam perumusan dan pengimplementasian pilihan kolektif. Dengan dasar definisi tersebut, Krasner melanjutkan bahwa sebuah rezim bersifat temporer atau *ad hoc*.³⁵

³⁴ Stephen D. Krasner, *International Regimes* (Paperback), New York: Cornell University Press, 1983, terutama bagian "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables".

³⁵ Untuk tujuan tertentu, tidak untuk tujuan lain.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Tinjauan Pustaka

Konsep utama dari Tesis ini adalah peran negara dalam sektor perekonomian, kerja sama internasional G-20, dan moneter internasional. Penanganan krisis finansial global 2008 melalui kerja sama G-20 dapat dieksplorasi melalui pendekatan studi ekonomi politik internasional.

Studi-studi yang membahas tentang sistem moneter internasional sudah cukup banyak, beberapa di antaranya merupakan literatur ekonomi umum seperti karya Barry J. Eichengreen³⁶ yang memaparkan periodisasi sistem moneter internasional secara lengkap dari periode sistem emas klasik (*gold standard*) pada akhir abad ke-19 hingga periode mata uang mengambang (*float currency*) pada abad ke-21. Periodisasi sistem moneter ini dapat menuntun pemahaman kita atas pentingnya kestabilan sistem moneter internasional pada masa moderen.

Literatur lain seperti karya Joseph E. Stiglitz³⁷ memberikan ulasan komprehensif tentang kaitan antara keadaan sistem finansial global dan reformasinya. Dalam bukunya itu, Stiglitz menggarisbawahi dinamika ekonomi-politik internasional pada masa krisis, pergeseran *power*, hingga kebutuhan mendesak masyarakat internasional atas rezim keuangan global yang baru. Pengelompokan entitas ekonomi (terutama *advanced and developing countries*) mencerminkan kebutuhan masyarakat internasional akan rezim keuangan global baru yang lebih efektif dan *accountable*. Menurut Stiglitz bersama tim ahlinya melalui UN Commission of Financial Experts, rezim-rezim seperti FSB yang merupakan perluasan dari FSF idealnya tidak hanya diperluas secara keanggotaannya, melainkan juga mencerminkan representasi, kondisi, dan kebutuhan negara-negara berkembang. Pada praktiknya, kebanyakan suara *developing countries* belum sepenuhnya terwakilkan dalam *standard-setting institutions* dewasa ini. Contohnya, Basel Committee of Banking for International Settlements yang menyediakan *data disseminations*, pengawasan bank, regulasi keuangan, dan pemerintahan korporasi

³⁶ Barry J. Eichengreen, *Globalizing Capital: A History of the International Monetary System*, Second Edition (Paperback), New Jersey: Princeton University Press, 2008.

³⁷ Joseph E. Stiglitz, *The Stiglitz Report: Reforming the International Monetary and Financial Systems in the Wake of the Global Crisis*, New York: New Press, 2010.

(*corporate governance*) bagi sektor perekonomian (finansial) internasional. Kurangnya representasi negara-negara berkembang dalam institusi *ad hoc* ini menghasilkan analisis dan rekomendasi yang tidak lengkap dan bias bagi reformasi sektor keuangan itu sendiri, dan khususnya kebijakan negara-negara berkembang atas sektor finansial mereka.

Belum terlalu banyak literatur yang membahas peran G-20 dan signifikansinya terhadap kerja sama dan/atau reformasi sistem keuangan internasional karena memang proses ini masih berjalan dan usia G-20 sendiri baru satu dekade. Beberapa di antaranya adalah *International Monetary System, the IMF and the G20: A Great Transformation in the Making?*³⁸ Literatur ini merupakan kumpulan tulisan pakar ekonomi, praktisi, dan akademisi yang antara lain membahas reformasi IMF, analisis kelemahan sistem moneter terkini, dan debat akademis dan praktis terkait isu-isu tersebut.

Secara teoritis, pentingnya peran negara dalam mengatur sektor perekonomian, khususnya terkait studi ekonomi politik internasional dalam Hubungan Internasional (HI), salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Robert Gilpin.³⁹ Menurut Gilpin, segala aktivitas perekonomian harus tunduk pada tujuan pembangunan negara (*state building*) dan kepentingan negara yang bersangkutan (*national interests*). Dalam skala internasional, *economic nationalist* menekankan tentang pentingnya peran faktor-faktor ekonomi dan pergulatan di antara negara-negara dunia. Selain itu, perspektif *nationalist* (atau realisme) dalam ekonomi politik internasional menganggap bahwa *relative gain* lebih penting daripada *mutual / absolute gain*.⁴⁰ Dengan demikian, negara terus berusaha mengubah peraturan-peraturan atau rezim yang memengaruhi hubungan ekonomi internasional agar bisa lebih menguntungkan pihaknya ketimbang negara-negara lain. Dalam bukunya yang lain, Gilpin⁴¹ juga menambahkan bahwa negara senantiasa berjaga-jaga terhadap ancaman nyata dan/atau ancaman laten atas kemerdekaan politik dan ekonominya. Oleh karena itu, negara selalu beradaptasi terhadap perubahan dalam hubungan kekuasaan dan konsekuensi atas kepentingan nasionalnya.

³⁸ World Economic Forum, *International Monetary System, the IMF and the G20: A Great Transformation in the Making?*, Palgrave Macmillan, 2007.

³⁹ Robert Gilpin dalam Kendall Stiles dan Tsuneo Akaha (ed.), *International Political Economy*, New York: HarperCollins Publishers, 1991, h. 8.

⁴⁰ *Relative gain* yaitu perolehan yang mengutamakan kesenjangan (gap) antara aktor-aktor yang terlibat (terutama *state*) dalam proses. Sedangkan *mutual / absolute gain* yaitu perolehan yang mengutamakan maksimalisasi tertinggi dari hasil suatu proses (biasanya dianut oleh para liberalis).

⁴¹ Robert Gilpin, *op.cit.*, New Jersey: Princeton University Press, 2001, h. 19.

Dalam tingkat praktik, Stiglitz (2006) juga menganjurkan pentingnya peran negara terhadap sektor perekonomian. Menurut Stiglitz dengan berkaca pada pengalaman China, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Asia lainnya yang sukses, “...*Government has a large role to play. The right mix of government and markets will differ between countries and over time... The list of potential arenas for government action is large. Today, nearly everyone agrees that government needs to be involved in providing basic education, illegal frameworks, infrastructure, and some elements of social safety nets, and in regulating competition, banks, and environmental impacts.*”⁴² Dalam penjelasannya itu, Stiglitz mengambil contoh sukses dari negara-negara di Asia Timur. Negara-negara tersebut bisa bertumbuh dan mempertahankan pertumbuhannya (*sustainable*) antara lain karena dominannya peran negara dalam mengatur orientasi pasar domestiknya yang diimbangi peran serta pasar yang aktif, bukan dilepas begitu saja seperti yang dianjurkan oleh IMF pada masa-masa sebelum krisis Asia 1997⁴³. Hasilnya, negara seperti China yang menerapkan *standard expansionary macro-policies* mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 7 hingga 9 persen per tahun dan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak rakyatnya. Yang terpenting, menurut Stiglitz, dominasi peran negara dalam perekonomian dari contoh kasus tersebut adalah manfaat pertumbuhan dan pembangunan diperuntukkan bagi masyarakatnya secara luas. Negara-negara Asia Timur berfokus tidak hanya pada stabilitas harga dan tingkat inflasi (resep klasik IMF), melainkan juga pada stabilitas yang sebenarnya, menjamin bahwa lapangan pekerjaan baru tercipta dalam langkah yang sama dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia (*sustainability growth*).

Terkait peran negara dalam sistem perekonomian, Paul Krugman⁴⁴ juga menekankan tentang pentingnya aspek tersebut, terutama dalam penanganan krisis finansial dan bagaimana mencegahnya. Menurut Krugman, peran negara sebagai pembuat kebijakan sangat memengaruhi keadaan pasar, dalam hal ini pasar finansial

⁴² Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work*, New York: W.W. Norton & Company, 2006, h. 28-29.

⁴³ Neoliberalisme percaya bahwa *state* tidak selayaknya ikut campur dalam pengaturan pasar karena akan melahirkan inefisiensi, melainkan mendorong pasar bebas yang digerakkan oleh mekanisme *invisible hands* ala Adam Smith. Salah satu produk neoliberalisme yaitu *Washington Consensus* yang memiliki tiga agenda utama: *free-trade*, privatisasi, dan deregulasi, lih. Joseph Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, New York: W.W. Norton & Company, 2003, terutama Bab III, sebagai pandangan kritis tentang neoliberalisme dan resep klasik *Washington Consensus* tersebut.

⁴⁴ Paul Krugman, *op.cit.*

masa moderen yang sangat sensitif terhadap dinamika ekonomi-politik domestik dan internasional. Krugman mencontohkan isu ini dengan mengangkat siklus krisis ekonomi di Amerika Latin, Jepang, Asia, hingga krisis finansial global yang dimulai dari AS itu dalam bab-bab yang terpisah dan sistematis. Krugman berargumen bahwa orientasi ekonomi pemerintah yang terlalu berfokus pada penyerapan FDI dengan jalan hutang luar negeri, bahaya “*moral hazard*”, kemudian diikuti dengan kebijakan ekonomi (moneter) yang tidak tepat, serta serangan eksternal seperti *short selling* dapat mengguncang setiap sendi perekonomian negara yang kini menjadi momok semua orang itu. Keadaan diperparah jika *shadow banking system* telah mengambil alih mayoritas transaksi kredit dan investasi. Oleh karena itu, Krugman seperti halnya ekonom John Keynes dari masa Depresi Besar 1930-an, menawarkan pandangan tentang pentingnya regulasi dan pengawasan ketat terhadap dunia perbankan, terutama pada masa krisis tidak terjadi. Di sinilah peran negara menjadi sangat penting.

Kerja sama G-20 dalam mengatasi krisis finansial global melibatkan peran aktif negara-negara beserta organisasi internasional seperti World Bank dan IMF di dalamnya. Nuansa multilateralisme dapat kita cermati dalam kerja sama G-20. Pada intinya, multilateralisme mengacu pada hubungan koordinasi antara tiga negara atau lebih yang sejalan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, seperti yang diungkapkan John G. Ruggie.⁴⁵ Menurutnya, diksi “multilateralisme” merupakan sebuah “*adjective*” yang melengkapi “*noun*” (kata benda) “institusi”. Sementara itu, “institusi” seperti yang dikemukakan Robert Keohane, sebagai seperangkat aturan-aturan yang ketat dan bertautan, formal dan informal, yang menetapkan peran masing-masing, mengatur aktivitas, dan yang menciptakan ekspektasi.⁴⁶ Yang membedakan bentuk multilateralisme dari yang lainnya, yaitu bahwa itu mengoordinasi perilaku (*behavior*) tiga negara atau lebih yang terlibat di dalamnya atas dasar prinsip-prinsip tertentu yang disepakati bersama (*on the basis of generalized principles of conduct*). Meski demikian, multilateralisme tidak melulu merupakan ide utama dari perspektif liberalisme dalam studi HI. Robert Gilpin⁴⁷ dari perspektif *state-centric realism* misalnya, mengemukakan bahwa *state* bukanlah satu-

⁴⁵ John G. Ruggie, *Multilateralism Matters* (ed), New York: Columbia University Press, 1993, h. 8.

⁴⁶ *Persistent and connected sets of rules, formal and informal, that prescribe behavioural roles, constrain activity, and shape expectations.* Robert Keohane, *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory*, hlm. 163.

⁴⁷ Robert Gilpin, *op.cit.*, h. 18.

satunya aktor penting dalam isu-isu internasional. Dia mengakui bahwa peran institusi-institusi lain seperti World Bank, IMF, Uni Eropa, dan lain-lain juga penting dalam kerja sama multilateral. Hanya saja, perspektif *state-centric* tetap memandang bahwa pemerintah (atau *state*) tetap membuat keputusan utama terkait urusan ekonomi. Merekalah yang menetapkan peraturan bagi fungsi masing-masing aktor, dan mereka menggunakan kekuasaannya (*power*) untuk memengaruhi hasil ekonomis (*economic outcomes*) yang ingin dicapainya ketika terlibat dalam forum multilateral.

Dalam bukunya yang lain, Ruggie⁴⁸ membahas kembali mengupas tentang konsep multilateralisme. Menurut Ruggie, multilateralisme (atau institusionalisme internasional) yang tercermin melalui “rezim” atau “organisasi internasional” merupakan kumpulan prinsip, proses, dan mekanisme di mana negara-negara bertindak secara terorganisir (*organized*).⁴⁹ Meski demikian, Ruggie tidak mendukung konsep “*sovereignty above states*” dalam “*political community of states*” tersebut. Oleh karena itu, dalam penjelasannya itu Ruggie mengalamatkan gagasannya sebagai “institusionalisasi”, ketimbang “*international integration*”.

Secara teoritis, konteks kerja sama negara-negara anggota G-20 dan dominasi negara peran negara dalam institusionalisasi dekat dengan konsep yang dikatakan Kenneth Waltz dalam bukunya *Neorealism and Its Critics* (1986): “*States that are heavily dependent, or closely interdependent, worry about securing that which they depend on. The high interdependence of states means that the states in question experience, or are subject to, the common vulnerability that high interdependence entails. Like other organizations, states seek to control what they depend on or to lessen the extent of their dependency. This simple thought explains quite a bit of the behaviour of states: their imperial thrust to widen the scope of their control and their autarchic strivings toward greater self-sufficiency. Structures encourage certain behaviours and penalize those who do not respond to the encouragement.*”⁵⁰ Atau dengan kata lain, negara selalu waspada terkait posisi relatifnya dalam ekonomi politik internasional. Dalam kondisi *self-help* global tersebut, meminjam istilah yang dikemukakannya itu,

⁴⁸ John G. Ruggie, *Constructing the World Polity*, New York: Routledge, 1998, terutama Bab I.

⁴⁹ Ibid, h. 42.

⁵⁰ Kenneth Waltz dalam Robert E. Keohane (ed), *Neorealism and Its Critics*, New York: Columbia University Press, 1986, h. 103.

negara berjaga-jaga terhadap kemungkinannya menjadi terlalu bergantung pada negara/suatu rezim lain dalam konteks kerja sama atau sistem internasional.

Terkait penyebab krisis finansial itu sendiri, penting untuk memahami kondisi sistem keuangan internasional sebelum kita beranjak ke pembahasan lebih mendalam tentang krisis. Sistem finansial internasional pada masa moderen dijelaskan salah satunya oleh Gilpin⁵¹. Di situ Gilpin mengemukakan globalisasi dalam hal finansial merupakan salah satu fitur penting dan unik dalam perekonomian dunia sekarang. Dana transkapital dapat bergerak bebas dan secara harafiah telah mengintegrasikan banyak negara di dunia dalam hal akses dan interdependensi. Jumlah dana transnasional yang bergerak tiap harinya meningkat dari US\$ 15 miliar pada tahun 1973 menjadi US\$ 1,2 triliun pada 1995. Meski demikian, Gilpin juga mengemukakan bahwa argumen globalisasi finansial tersebut tidak sepenuhnya diterima. Logikanya adalah jika seluruh dunia benar-benar sudah terintegrasi secara finansial maka rumus tingkat tabungan nasional dan investasi tidak lagi relevan, dan tingkat suku bunga di seluruh belahan dunia akan hampir sama. Nyatanya tidak. Negara-negara seperti Jepang, contohnya, di mana tingkat tabungan nasionalnya tinggi cenderung untuk berinvestasi ke luar negeri, dan sebaliknya untuk negara-negara yang memiliki tabungan nasional rendah. Meski demikian, tambah Gilpin, globalisasi secara finansial merupakan sebuah realitas dan memiliki implikasi mendalam terhadap ekonomi internasional. Dia mencontohkan krisis finansial 1997 di Asia di mana dana-dana investasi spekulatif (*short-term, speculative flows*) dapat mengakibatkan destabilisasi keadaan ekonomi-politik negara-negara di Asia saat itu.

Bagaimana dengan penyebab itu berdasarkan sebuah *workshop* yang digelar pada tanggal 24-26 Mei 2009, negara-negara anggota G-20 beserta pakar-pakar yang menghadiri *workshop* tersebut menyepakati bahwa krisis finansial kali ini disebabkan oleh dua hal, yakni:⁵²

1. Kegagalan negara mengenai regulasi pergerakan kapital transnasional; dan
2. Kegagalan International Monetary System (IMS) yang kemudian berimplikasi pada konstelasi kebijakan ekonomi negara-negara dunia.

⁵¹ Robert Gilpin, *op.cit.*, terutama Bab X, "The International Financial System", hlm. 261-277.

⁵² *G_20_workshop_causes_of_the_crisis*, hlm. 5. diunduh melalui http://www.g20.org/Documents/g20_workshop_causes_of_the_crisis.pdf, diakses pada tanggal 12 Desember 2009.

Pada kesempatan yang sama, Claudio Borio⁵³ menganjurkan tentang perlunya penguatan regulasi orientasi makroekonomi dan *framework* pengawasan pergerakan kapital transnasional yang lebih terpadu, sesuai yang didukung oleh para negara anggota G-20.

Tulisan ini mengambil posisi, yaitu dominasi peran negara terhadap sektor perekonomiannya melalui kerja sama internasional (G-20).

1.4.2. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan asumsi dasar neorealisme dalam ekonomi politik internasional, yaitu bahwa negara adalah aktor rasional dalam perekonomiannya (*state is the rationale actor*) yang memandang bahwa sektor perekonomian tunduk pada pembangunan negara-bangsa (*nation-state building*), serta kepentingan nasional (*national interest*)-nya berdasarkan posisi relatif dalam sistem internasional. Asumsi dasar neorealisme yang digunakan adalah neorealisme yang dikemukakan Joseph Grieco dengan mengacu pada pemikiran Hans J. Morgenthau dan Kenneth Waltz.⁵⁴ Grieco mengemukakan bahwa realisme (secara umum) memiliki lima asumsi dasar, antara lain:

1. Negara (*state*) adalah aktor utama dalam urusan internasional, meski bukan satu-satunya;
2. Dunia internasional akan menghukum negara-negara yang gagal dalam mengamankan kepentingan mereka atau jika mereka mengejar tujuan lain di luar konteks; oleh sebab itu, negara “*sensitive to costs*” dan bertindak sebagai *unitary-rational agents*.
3. Anarki internasional adalah daya utama yang membentuk motif dan aksi negara-negara.
4. Negara dipengaruhi oleh konflik dan kompetisi sehingga seringkali gagal dalam hal kerja sama, bahkan dalam kepentingan yang sama sekalipun.
5. Institusi internasional memengaruhi prospek kerja sama secara marginal.

⁵³ Panelis G-20 workshop on the Global Economy Mumbai, India 24-26 Mei 2009; Head of Research and Policy Analysis Monetary and Economic Department, Bank for International Settlements.

⁵⁴ Joseph Grieco dalam David A. Baldwin (ed.), *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*, New York: Columbia University Press, 1993, h. 118-119.

Sebagai teori khusus yang menunjang penelitian, penulis menggunakan teori *International Regime* menurut Stephen Krasner.⁵⁵ Menurut Krasner, “rezim” dapat diaplikasikan sebagai *intervening variable* dalam menjelaskan hubungan antara peran negara dan institusi internasional yang ada. Pertama-tama, Krasner memulai dengan definisi “rezim”, yaitu “*international regimes are defined as principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actor expectations converge in a given issue-area.*” - Prinsip (*principles*) didefinisikan sebagai kepercayaan atas fakta, variabel penyebab (*causation*), dan pembenaran (*rectitude*). Norma (*norms*) adalah standar perilaku yang mendefinisikan hak dan kewajiban anggotanya. Peraturan (*rules*) adalah resep (*prescription*) atau larangan (*proscription*) atas aksi. Prosedur perumusan kebijakan (*decision-making procedures*) adalah praktik umum dalam perumusan dan pengimplementasian pilihan kolektif. Dengan dasar definisi tersebut, Krasner melanjutkan bahwa sebuah rezim bersifat temporer atau *ad hoc*.⁵⁶ Oleh karena itu, perubahan dalam prosedur perumusan kebijakan lazim terjadi dalam sebuah rezim. Hanya perubahan prinsip atau norma yang dapat mengubah rezim itu sendiri. Rezim sebagai *intervening variable* dijabarkan Krasner sebagai berikut:

Pola dasar di mana rezim memodifikasi pengaruh dari *basic causal variables* dalam menciptakan *related behavior and outcomes*:

Basic causal variables → Regime → Related Behavior and Outcomes

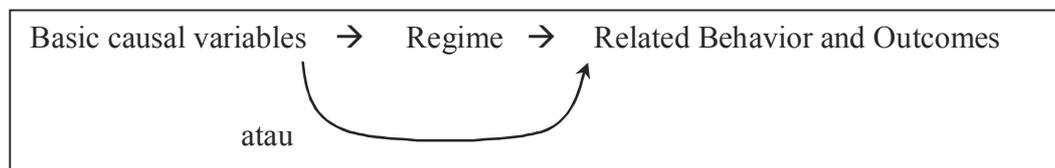
Konsep tradisional menganggap bahwa rezim *insignificant* sebagai variabel dalam Hubungan Internasional sehingga tidak menggunakannya dalam analisis proses:

Basic causal variables → Regime → Related Behavior and Outcomes

⁵⁵ Stephen D. Krasner, *op.cit.*, terutama bagian "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables".

⁵⁶ Untuk tujuan tertentu, tidak untuk tujuan lain.

Modified structuralist approach menganggap rezim sebagai sebuah koordinator perilaku dalam mencapai hasil yang diharapkan terkait isu internasional tertentu sehingga:



Krasner mengeksplorasi lima *basic causal variables* dalam kaitannya terhadap perkembangan rezim, antara lain:

1. *Egoistic self-interest*

Perkembangan rezim mungkin terjadi jika biaya (*cost*) dari mencari keuntungan sendiri (*egoistic self-interest*) dan '*maximization of one's own utility function*' lebih tinggi daripada kerja sama, atau terlalu kompleks.

2. *Political power*

Kekuasaan politik digunakan untuk mempromosikan maksimalisasi bersama atau demi memperkuat nilai-nilai aktor tertentu (hegemon).

3. *Norms and Principles*

Bagian di mana nilai-nilai yang terlebur (*diffused*) seperti kedaulatan akan memengaruhi perkembangan rezim secara tidak langsung pada area isu yang lain.

4. *Usage and Custom*

Usage mengacu pada *regular patterns of behavior based on actual practice; custom, to long-standing practice*. Praktik yang berulang-ulang ini kemudian tampak seperti aturan yang sah/baku (*legitimate rule-like*) yang seiring berjalannya waktu akan mendistribusikan ekspektasi yang sama dan menjadi nilai yang telah terlebur.

5. *Knowledge*

Pengetahuan menciptakan dasar bagi kerja sama dalam menghapus interkoneksi kompleks yang sebelumnya belum bisa dipahami.

1.5. Asumsi

Dalam Tesis ini beberapa asumsi yang digunakan penulis antara lain:

1. Krisis finansial yang bermula dari Amerika Serikat pada kisaran tahun 2006 memengaruhi keadaan finansial banyak negara lain dengan dampaknya yang kait-mengait antara politik, ekonomi, dan sosial.
2. Karakter modal atau kapital yang bergerak secara transnasional dan dapat memengaruhi stabilitas sosial-politik negara-negara dunia membutuhkan intervensi negara sehingga dapat stabil.
3. Pembentukan kerja sama internasional membutuhkan beberapa prasyarat seperti urgensi keadaan, kapabilitas negara, dan tujuan akhir yang kemudian melahirkan *rational choice* untuk melangsungkan kerja sama global dalam lingkup G-20.
4. Keberhasilan kerja sama G-20 hanya dapat dicapai oleh peran aktif semua negara anggota dan komitmen masing-masing untuk berkontribusi pada penanganan krisis.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam Tesis ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini menekankan pada penelitian sumber tertulis atau studi literatur.⁵⁷ Tahapan yang harus dilakukan adalah tahap pencarian, penelusuran, dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan ilmu Hubungan Internasional dan dapat digunakan dalam penelitian ini. Pencarian sumber-sumber penulisan (dapat) dilakukan melalui studi kepustakaan. Pada tahap ini, berhasil dikumpulkan sumber-sumber primer maupun sekunder. Sumber primer yang ditemukan berupa tiga komunike G-20 yang dihasilkan oleh tiga KTT G-20 (*summit*) terpisah, yaitu KTT Washington, AS pada 15 November 2008, di London, Inggris pada 2 April 2009, dan terakhir di Pittsburgh, AS pada 25 September 2009. Data sekunder yang berasal dari bahan bacaan seperti buku, jurnal, maupun media massa lainnya, baik dalam bentuk media cetak seperti majalah, koran, ataupun dalam bentuk

⁵⁷ Lawrence W. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 3rd. Ed. Boston: Allyn and Bacon, 1997, h. 70.

media visual seperti situs web (*website*) resmi G-20, OECD, dan institusi global lainnya yang terkait. Teknik mengumpulkan data yang digunakan adalah studi literatur dengan membaca dan menganalisis bahan-bahan bacaan, kajian ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan G-20.

Baik sumber primer maupun sekunder yang penulis berhasil kumpulkan sangat berguna untuk menunjang penulisan proposal ini sebagai sebuah penelitian awal. Pada tahap pengumpulan sumber-sumber penelitian yang relevan ini terdapat kendala yang dihadapi penulis. Kendala yang dihadapi dari pengumpulan sumber-sumber penelitian ini adalah terbatasnya waktu.⁵⁸ Namun, sejauh ini sumber-sumber yang relevan dapat diperoleh dari perustakaan UPDHI dan perpustakaan FISIP UI (Miriam Budiardjo Research Center), Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, arsip jurnal dan buku di website seperti JSTOR, SAGE, serta penggunaan beberapa buku koleksi pribadi.

Tahap kedua dari metode penelitian yang digunakan dan harus dilakukan adalah dengan menggunakan metode *eksplanasi* yang tentunya melakukan tahapan Kritik. Selain itu, penulis juga menerapkan *Historical Perspective Research* dalam melakukan penelitian ini. Pada tahap ini penulis berusaha menguji data-data yang berhasil ditemukan, baik dari sumber primer maupun sekunder tersebut yang antara lain dengan membandingkan data yang terdapat pada sumber primer dengan implementasi konkret yang terdapat dalam sumber sekunder. Dari proses kritik ini diharapkan dapat dikumpulkan fakta-fakta yang akurat sebagai bahan penulisan.

1.6.1. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini memiliki hipotesis, yaitu:

Proses kerja sama G-20 dalam penanganan krisis finansial global 2008-1009 dilakukan oleh negara dengan menggunakan rezim-rezim keuangan internasional sebagai fasilitator untuk mencapai pemulihan ekonomi global dan reformasi keuangan global.

⁵⁸ John A. Creswell (terjemahan oleh Aris Budiman), *Research Design: Qualitative and Quantitative Approachs*, Jakarta: Klik Press, 2002. h. 57.

1.6.2. Sistematika Penelitian

Tesis ini terdiri atas empat bab, antara lain:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang mengangkat permasalahan dan gambaran umum tentang masalah tersebut. Di dalamnya juga menjelaskan sub-bab kerangka pemikiran yang akan digunakan, metode penelitian, serta asumsi dan hipotesis.

Bab II: *International Monetary System* (IMS) dan Krisis Finansial Global 2008. Bab ini akan menjelaskan proses terjadinya krisis finansial global 2008 dan kaitannya dengan keadaan sistem keuangan internasional. Penulis akan memaparkan bagaimana krisis finansial yang tadinya berawal dari Amerika Serikat pada tahun 2006 kemudian meluas ke banyak negara dunia pada tahun 2008. Bab ini akan diawali dengan uraian mengenai latar belakang historis keadaan sistem keuangan internasional (*International Monetary System/IMS*). Selanjutnya pembahasan akan menguraikan bagaimana krisis finansial dapat meluas ke negara-negara lain berdasarkan keadaan IMS yang disebutkan sebelumnya. Selain itu, empat titik krisis ekonomi sebelum krisis finansial global 2008 juga akan dipaparkan secara singkat dan komprehensif pada bagian ini.

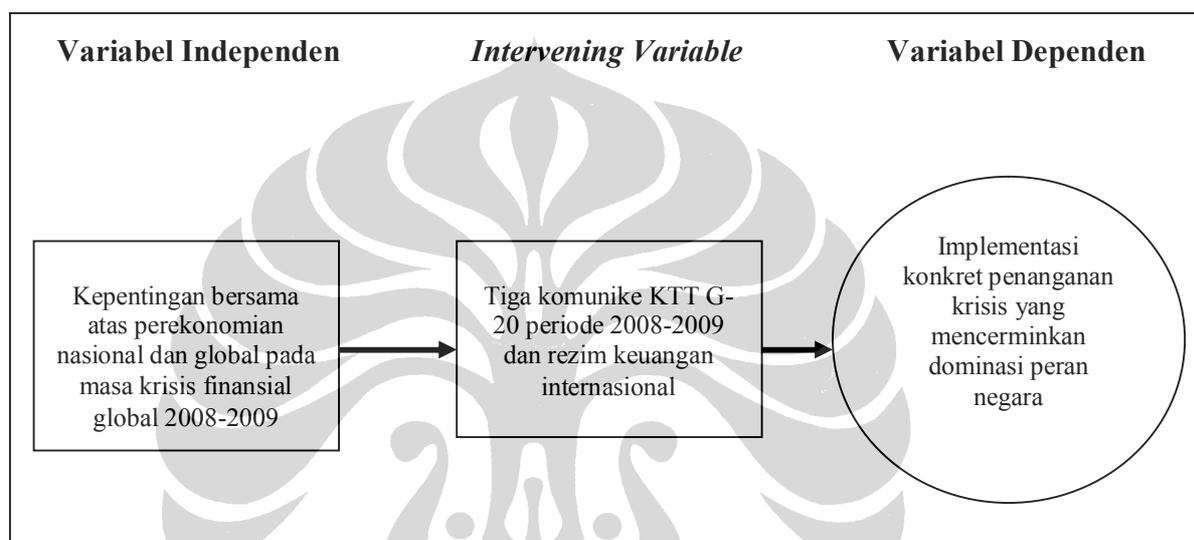
Bab III: Komunike G-20 Proses Penanganan Krisis Finansial Global. Pertama-tama, bab ini akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan G-20 sebagai forum global yang merespons isu finansial, apa yang terjadi selama proses tersebut, serta hal-hal yang melatarbelakanginya. Selain sejarah pembentukan G-20, bab ini juga akan menjelaskan bagaimana G-20 merespons ancaman krisis finansial, termasuk di dalamnya analisis komunike G-20 sebagai dokumen resmi yang menandakan komitmen dan *political will* negara-negara anggotanya dalam penanganan krisis. Penjelasan berikutnya adalah intervensi konkret negara terhadap sektor perekonomian dan pencapaian-pencapaian negara yang tergabung dalam forum G-20 sebagai indikator keberhasilannya.

Bab IV: Kesimpulan. Bab ini merupakan bagian penutup yang akan menjelaskan secara singkat kesimpulan dari aspek pembahasan bab-bab sebelumnya, serta kesimpulan umum secara keseluruhan. Selanjutnya, bab ini juga akan memberikan sedikit ulasan

bagaimana keberlangsungan kerja sama G-20 terhadap penanganan krisis finansial global hingga sejauh ini.

1.7. Model Analisis

Gambar 1
Model Konseptual Penelitian



Dalam gambar di atas dapat kita simak terdapat variabel independen "Kepentingan bersama atas perekonomian nasional dan global pada masa krisis finansial global 2008-2009", kemudian diikuti *intervening variable* "Tiga komunike KTT G-20 periode 2008-2009 dan rezim keuangan internasional" sehingga menghasilkan variabel dependen "Implementasi konkret penanganan krisis yang mencerminkan dominasi peran negara".